

ISBN: 978-602-70430-0-8

Editor: Aidul Fitriciada Azhari, dkk.

# **PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

## **KESIAPAN INDONESIA: HARMONISASI HUKUM NEGARA-NEGARA ASEAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015**

Auditorium Muhammad Djasman Al-Kindi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
28 Januari 2015



**Diselenggarakan:**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Community 2015

asean



---

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara Asean

Menuju Komunitas Asean 2015 / Azhari, dkk. [ed.]

Surakarta: Muhammadiyah University Press

vi, 478 hal, 28 cm

ISBN

1. Judul

2. Hukum

---

**TIM EDITOR**

**Ketua:**

DR. Aidul Fitriadi Azhari, SH, M.Hum

**Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan yang Baik:**

DR. Nuria Siswi Enggarani, SH, M.Hum

**Tema Umum:**

Mutimatun Ni'ami, SH, M.Hum

**Tema Hukum Penyelesaian Sengketa:**

Nadia Nurani Isfarin, SH, LLM

**Tema Korupsi dan Ekstradisi:**

Muchammad Iksan, SH, M.Hum

**Tema Hukum Bisnis:**

Arvie Johan, SH, M.Hum

**Tema Hukum Lingkungan:**

Prof. DR. Absori, SH, M.Hum

**Copyright ©2015**

Hak Cipta pada penyusun dan dilindungi Undang-undang

Desain Cover: MUP

Layout: Nadia

---

**Diterbitkan:**

Muhammadiyah University Press

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102

Telp. (0271) 717417-172

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Prosiding seminar Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015 dapat diterbitkan. Diharapkan melalui penerbitan prosiding ini dapat menjadi masukan dan memberikan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan agar terwujud harmonisasi sistem hukum nasional dengan sistem hukum internasional yang dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi problema transnasional yang timbul disebabkan interaksi antar masyarakat bangsa-bangsa.

Seminar nasional dengan tema “Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015” dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015 di Auditorium Muhammad Djazman Universita Muhammadiyah Surakarta, mengambil enam subtema, yaitu:

1. HAM & Good Governance
2. Hukum Lingkungan & Sumber Daya Alam
3. Hukum Bisnis
4. Korupsi dan Ekstradisi
5. Hukum Penyelesaian Sengketa
6. General

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada para penulis makalah, penyaji, peyunting, redaksi pelaksana serta semua pihak yang terkait yang telah bekerja keras sehingga prosiding ini dapat diterbitkan.

Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih.

Panitia

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv

## DAFTAR ISI

### A. HAK ASASI MANUSIA DAN *GOOD GOVERNANCE*

TANGGUNG JAWAB KORPORASI TRANSNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015.....	1-10
<i>Isplancius</i>	
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI ERA KOMUNITAS ASEAN: KRITISI TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU SUBSISTEM POLITIK HUKUM .....	11-23
<i>Ricca Anggraeni, Indra Rahmatullah</i>	
PENGARUH MODALITAS HAM NEGARA-NEGARA ANGGOTA TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM DAN MEKANISME HAM ASEAN .....	24-40
<i>Budi Hermawan Bangun</i>	
REVITALISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN MENUJU <i>GOOD GOVERNANCE</i> .....	41-54
<i>Hayat</i>	
QUO VADIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ASEAN (TELAH TERHADAP INSTRUMEN ASEAN TENTANG PEKERJA MIGRAN) .....	55-73
<i>Nadia Nurani Isfarin</i>	
PEMBAHARUAN HUKUM, <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN HAK ASASI MANUSIA HUKUM YANG MENDUKUNG INDONESIA MENGHADAPI KOMUNITAS ASEAN 2015 .....	74-95
<i>Siska Diana Sari</i>	

### B. HUKUM LINGKUNGAN & SUMBER DAYA ALAM

MEMPERTIMBANGKAN FILSAFAT KRITIS DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> DALAM PERGUMULAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN .....	96-107
<i>Muhammad Rustamaji</i>	
PROSPEKTIF PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING</i> DALAM DINAMIKA PEMBENTUKAN ASEAN COMMUNITY 2015 .....	108-117
<i>Davina Oktivana</i>	
PERAN ASEAN DALAM MENGEMBANGKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL REGIONAL.....	120-127
<i>Andreas Pramudianto</i>	
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG PARTISIPATIF .....	144-151
<i>Abdullah</i>	
TANGGUNG JAWAB TATA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DIBIDANG KEHUTANAN MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015 (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU) .....	163-171
<i>Ardiansyah</i>	



### C. HUKUM BISNIS

HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (OPTIMALISASI TUPOKSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SE-SOLO RAYA) ..... <i>AL. Sentot Sudarwanto</i>	183-197
✓ LEX INFORMATICA SEBAGAI SARANA HARMONISASI HUKUM DALAM ELECTRONIC COMMERCE UNTUK MEMPERLANCAR TRANSAKSI ME-ASEAN..... <i>Ign Sumarsono Raharjo</i>	198-217 ✓
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI POLA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN ..... <i>Anna Maria Tri Anggraini</i>	218-243
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ALTERNATIF (MEDIASI) DI INDONESIA DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN..... <i>Hassanain Haykal</i>	244-256
PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ..... <i>Budi Hermono</i>	257-268
TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA MEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESIA..... <i>Lindawaty S.Sewu, Hassanain Haykal, Arman Tjoneng</i>	269-282
HARMONISASI HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTAATAS FOLKLOR ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DENGAN SEMANGAT PEACEFULCO-EXISTANCE..... <i>Fithriatus Shalihah</i>	283-294
PEMBERDAYAAN ETIKA BISNIS SEBAGAI PENYEIMBANG DALAM MENGHADAPI MEA 2015 ..... <i>Nuria Siswi Enggarani</i>	295-314

### D. KORUPSI DAN EKSTRADISI

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISIMPAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN..... <i>Yeni Widowaty</i>	315-328
KERANGKA KERJA DAN PRAKTEK EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIKPERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ASEAN..... <i>Trisno Raharjo</i>	329-343
TRANSNATIONAL CRIMES SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN MODEL PERJANJIAN EXTRADISI DI KAWASAN ASEAN..... <i>Ujuh Juhana</i>	344-361
STUDI KRITIS REMISI DAN PELEPASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPTOR DALAM MEMAHAMI ASEAN COMMUNITY 2015 ..... <i>Mohammad Darudin</i>	362-373

### E. HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

KAJIAN TERHADAP ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015..... <i>Prita Amalia</i>	374-388
PERAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA INTERNASIONAL DI KAWASAN ASEAN..... <i>R.Eriska Ginalita D</i>	389-403

## **F. GENERAL**

HARMONISASI HUKUM KEIMIGRASIAN DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 .....	404-421
<i>Bilal Dewansyah</i>	
KERJASAMA KEAMANAN MARITIM DI ASIA TENGGARA: TANTANGAN BAGI ASEAN DAN INDONESIA.....	422-436
<i>Aryuni Yuliantiningsih</i>	
PENGARUH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA.....	437-447
<i>Aristya Windiana</i>	
HARMONISASI DALAM PERSAINGAN ANTARA HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM BARAT UNTUK REFORMASI HUKUM NASIONAL MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015.....	448-461
<i>Anti Mayastuti, Heri Hartanto, Junaidi</i>	
PERANAN HUKUM DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DI INDONESIA.....	462-478
<i>Rosyidi Hamzah</i>	

## ***Lex Informatica* Sebagai Sarana Harmonisasi Hukum dalam *Electronic Commerce* untuk Memperlancar Transaksi ME-ASEAN**

**Ign. Sumarsono Raharjo**  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
ig\_son@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Indonesia perlu mempunyai peran yang besar dan menjadi negara yang *primus inter pares* terhadap negara-negara ASEAN lainnya karena dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan negara dengan potensi konsumen yang paling besar. Indonesia harus bergerak jauh ke depan memperbaiki segala sektor ekonomi dan perdagangan agar mampu menjadi motor untuk liberalisasi ekonomi ASEAN. Namun, ternyata kendala-kendala nampak nyata di depan mata karena seperti *index factor* daya saing yang cukup rendah, tingkat korupsi yang tinggi, pengaturan investasi dan perdagangan yang tidak pasti serta berbelit. Di sisi lain, penggunaan *cyber*, Indonesia menduduki posisi terdepan bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN sehingga potensi penggunaan *cyber* yang besar ini dapat didorong sebagai sarana untuk pengembangan *Electronic Commerce (E-com)* yang menjadi alat transaksi perdagangan antar negara ASEAN. Dari aspek perekonomian, *E-com* menjadi salah satu metode yang sangat mendukung kelancaran bertransaksi terutama transaksi internasional yang jelas sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perbaikan iklim perekonomian.

Sejauh ini Indonesia memiliki UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum transaksi *E-com* dengan penggunaan asas misalnya: *Mail box theory* (Teori Kotak Pos), *Acceptance theory* (Teori Penerimaan), *Proper Law of Contract*, dan *The most characteristic connection* dan telah berkembang menjadi *Lex Informatica*. Disamping itu, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur lebih spesifik terkait sistem transaksi elektronik menjadi dasar untuk pengembangan *Lex Informatica* dalam *E-com* sehingga mempermudah harmonisasi hukum bagi ME-ASEAN.

Paper ini memberikan deskripsi benefit yang bisa diperoleh Indonesia jika dapat memaksimalkan sistem *E-com* secara optimal dalam melakukan transaksi dengan negara-negara ME-ASEAN, karena setiap Negara dalam ME-ASEAN mempunyai pengaturan serupa sehingga berpotensi sebagai *Lex Informatica* seperti layaknya *Lex Mercatoria* yang telah berkembang lama. Melalui pendekatan *statute* dan *comparative*, paper ini menganalisis kendala dan tantangan yang mungkin harus diatasi dari perspektif perkembangan hukum bisnis khususnya bagaimana akselerasi harmonisasi hukum melalui *E-com*. Dalam perspektif ketatanegaraan, paper ini menganalisis apakah Undang-Undang Perdagangan juga bisa memayungi hubungan hukum melalui semua transaksi antara Indonesia dengan negara-negara ME-ASEAN, serta mendorong *Lex Informatica* sebagai sumber hukum untuk kemajuan bersama ME-ASEAN karena sarana informatika menjadi harapan besar dalam efisiensi dan efektivitas perekonomian.

**Key words :** *lex informatica*, *e-commerce*, harmonisasi hukum.



## A. Pendahuluan

Volume perdagangan dunia setidaknya pasca perang dunia kedua meningkat dengan pesat. Masing-masing negara menginginkan kemakmuran negaranya karena merasakan pahitnya perang. Sejak 1950-an, ekspor barang dan jasa negara-negara di seluruh dunia mengalami kenaikan rata-rata 6% per tahun<sup>203</sup> dan sekarang semakin akseleratif terutama negara yang mempunyai penetrasi kuat ke negara lain. Pertumbuhan ini sekaligus menciptakan dalam hukum yaitu *lex mercatoria* yang sangat dihormati para pedagang dan pengusaha di dunia, sehingga menjadi hukum yang kuat dan dipatuhi. *Lex mercatoria* terjadi karena *bestendig gebruikelijke bedingen*. Sistem perdagangan multilateral menjadi pemacu peningkatan volume perdagangan sekaligus menciptakan regulasi kebijakan perdagangan dan pembentukan institusi politik. Oatley<sup>204</sup> menyatakan sejak 1947 dengan dibentuknya institusi GATT yang memfasilitasi sistem perdagangan bebas, mencatat volume perdagangan bebas naik dengan cepat karena masing-masing negara mulai secara intensif memangkas hambatan perdagangan dalam bentuk pemangkasan tariff dan non-tarif, penyederhanaan regulasi sehingga barang-barang dan jasa lebih leluasa bergerak dari satu negara ke negara lain.

ME-ASEAN juga dimaksudkan antara lain, untuk peningkatan volume perdagangan barang dan jasa di ASEAN. ME-ASEAN mempunyai posisi strategis dalam konteks geografi maupun geopolitik. Pada tahun 2015 ini diperkirakan penduduk ASEAN adalah 633,1 juta jiwa dan Indonesia menempati yang pertama yaitu 245 jutaan, sehingga potensial menjadi pangsa pasar ASEAN dan dunia. Kalau tidak siap dan mengakselerasi peningkatan kualitas: sarana-prasarana, sumber daya insani, regulasi serta penyederhanaannya, Indonesia dengan penduduk yang besar hanya akan menjadi konsumen dan tidak akan menjadi *primus inter pares* diantara bangsa-bangsa di ASEAN.

Perkembangan internet di Indonesia yang mengesankan semakin membuka lahan baru bagi perdagangan karena telah membentuk koloni baru perdagangan dunia yaitu melalui *electronic business*, yang di masyarakat lebih dikenal dengan bagian darinya yaitu *electronic commerce*. Terjadi migrasi cukup besar perdagangan dari yang

<sup>203</sup> David Harvey, *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Yogyakarta, Resis Book, 2009, 6.

<sup>204</sup> Thomas Oatley, *International Political Economy: Interest and Institutions in the Global Economy*, New York, Pearson Longman, 2004: 17 – 22.

konvensional ke elektronik/digital. Sejak 1996, Indonesia telah mengembangkan diri dalam *E-com* melalui D-Net ([www.dnet.net.id](http://www.dnet.net.id)) untuk transaksi online, kemudian didukung *electronic banking* yang semakin baik untuk transfer dana. Mengutip Detik.com, Chairman Sharing Vision Dimitri Mahayana dari Lembaga Riset Telematika Sharing Vision menyatakan bahwa perdagangan melalui internet di Indonesia pada tahun 2009 telah mencapai 3,4 juta dollar. Angka belanja ini termasuk fantastis, namun bila dibandingkan dengan AS, capaian ini hanya 10% dari total transaksi yang terjadi di AS yang mencapai 34 miliar dolar. Bedanya, di AS, *E-com* telah mengalami kejenuhan, sedang Indonesia justru mengalami *booming*. Penyesuaian *booming* dengan pertumbuhan penetrasi internet dari tahun ke tahun kurang lebih 20% memunculkan permasalahan yaitu dibutuhkan pengamanan regulasi yang baik. Hukum nasional jelas tidak memadai karena karakter *E-com* yang *borderless* dan *paperless*. *E-com* dalam ruang siber hanya dibatasi oleh oleh *screens and passwords*.<sup>205</sup> Bahkan David Johnson dan David Post, menyatakan dengan ekstrim bahwa hubungan hukum di ruang siber telah membentuk perhubungan baru yaitu hubungan antara *legally significant (online) phenomena and physical location*. Pertanyaannya adalah apakah perkembangan *E-com* di dunia (lebih khusus di ASEAN) berpotensi membentuk hukum tersendiri yang di dunia dikenal dengan *lex informatica*?

### B. *Lex Informatica*

Ahmad M. Ramli<sup>206</sup> berpendapat bahwa *Lex Informatica* adalah suatu asas, kebiasaan, dan norma yang mengatur ruang siber dan tumbuh dalam ruang praktek dan diakui secara umum. Pertumbuhan *lex informatica* adalah kelanjutan dari pertumbuhan *lex mercatoria*<sup>207</sup> yang berkembang sejak abad pertengahan. Beragam pengertian dari *lex mercatoria* dikemukakan dan dikembangkan oleh para pakar hukum Eropa, seperti Clift Schmitthof, Goldman, Kahn, Eugen Langen, Julian Lew,

<sup>205</sup> David R. Johnson and David Post, "Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace", 481 *Stanford Law Review*, 1996: 1367.

<sup>206</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2004:21.

<sup>207</sup> Kata *Lex Mercatoria* berasal dari *lex* (bhs Inggris: law), *mercatoria* (bhs Inggris: merchant) jadi the law of merchant. Jan Ramberg, *International Commercial Transaction ICC Kluwer Law International*, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 1997:17 -22, mengatakan bahwa: "lex mercatoria is defined as customary transnational law of international stricto sensu, rules and institution conceived by nations (from which they were taken to govern their international (commercial relation) which its position with respect to positive law could be looked at in two ways that lex mercatoria perceived and applied as a body of legal rules within the international community of merchants,...".

Martin Hunter. Namun, dari pendapat yang beragam tersebut dapat disimpulkan bahwa *lex mercatoria* diartikan sebagai kebiasaan dan kepatutan umum dari masyarakat bisnis yang diterapkan dalam praktek hukum dagang di berbagai negara dan sering digunakan apabila terjadi kekosongan hukum sehingga menjadi *rechtsvinding*. *Lex mercatoria* bertumbuh dari para pedagang sendiri (*self regulation*) berupa aturan hukum kebiasaan komersial (*commercial customary law*) yang terbebas dari campur tangan negara. Hukum kebiasaan internasional seperti ini muncul di masyarakat abad pertengahan di Eropa Barat melalui berbagai praktek dan sopan santun dalam interaksi masyarakat komersial secara terus menerus. Maka dikenal *bill of exchange*, *bill of lading*, *Uniform Custom and Practises* (UCP) yang mengatur *Letter of Credit*, *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (UPICCs). Dan sejak tahun 1994 oleh para pakar dikategorikan sebagai *the New Lex Mercatoria*.<sup>208</sup> Dalam perkembangan teknologi informatika, hal ini dikenal sebagai *Lex Informatica*. Menurut Antonis Patrikios<sup>209</sup>, *Lex Informatica*:

*"...is the body of transnational rules of law and trade usages applicable to cross-border e-business transactions, created by and for the participants in cross-border e-business and applied by arbitrators to settle disputes on the basis of the intention of the parties and functional comparative law analysis taking into account the current state of play in e-business. Lex informatica is defined by its sources. It is the product of private decentralised law-making emerging mainly from the discourses of actors in cross-border e-business transactions and from information technology networks, and not from the political centres of nation-states and international institutions. Lex informatica is an expansive concept encompassing several specific variations depending on the e-business sector it derives from and to which it applies."*

Pendapat Antonis ini menunjukkan bahwa *lex informatica* bertumpu pada transaksi *e-business* dan berasal dari jejaring teknologi informasi sehingga berkembang dari itu dan tidak berasal dari kebijakan aturan yang dibuat oleh suatu negara dan lembaga internasional. Oleh karena itu maka kebiasaan-kebiasaan dan kepatutan yang berkembang dalam jejaring dan dipatuhi dalam transaksi *e-business* akan menjadi hukum bagi para pihak. Hal ini dipertegas oleh Laura Jennings and Susan McCoy<sup>210</sup>

<sup>208</sup>Lihat Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004:19-21.

<sup>209</sup>Antonis Patrikios, "Resolution of Cross-border E-business Disputes by Arbitration Tribunals on the Basis of Transnational Substantive Rules of Law and E-business Usages: The Emergence of the Lex Informatica", 21<sup>st</sup> BILETA Conference: Globalisation and Harmonisation in Technology Law, Malta, April 2006:5-6.

<sup>210</sup>Laura Jennings and Susan McCoy, *Cyberspace, Lex Informatica*, --, 2.



yang menyatakan bahwa *E-commerce as a business method has potential to create the legal norms and standards in cyber law*, Cyber law disini yang dimaksudkan sebagai *lex informatica*.

Menurut Darrel Menthe<sup>211</sup>, berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang siber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut. Pertama, *The Theory of the Uploader and the Downloader*. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk *uploading* kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk *downloading* kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan yurisdiksi ini.

Kedua adalah teori *The Law of the Server*. Pendekatan ini memperlakukan *server* dimana *webpages* secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah *webpages* yang berlokasi di *server* pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila *uploader* berada dalam yurisdiksi asing. Ketiga, *The Theory of International Spaces*. Ruang siber dianggap sebagai *the fourth space*. Yang menjadi analogy adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional yakni *sovereignless quality*.

Teori-teori yang berkembang dalam *lex informatica* ini menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa transaksi-transaksi elektronik terlebih lintas negara karena hukum nasional suatu negara (dhi. Indonesia dan berbagai negara pada umumnya) sulit untuk menjangkau karena akan tergantung pada keberlakuan Hukum Perdata Internasionalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 butir 2, yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan atau media elektronik lainnya. Namun, bagaimana penyelesaiannya transaksi ini belum jelas.

---

<sup>211</sup>Darrel Menthe, *Introduction in Cyberspace: A Theory of International Spaces*, available at <http://www.mttlr.org/volfour/menthe.html>. 2000,3-4.

### C. *Electronic Commerce*

*Electronic Commerce* adalah transaksi perdagangan yang mempunyai masa depan cerah. Fenomena *urbant growth* di ASEAN mendorong akselerasi perkembangan *E-com*. Bahkan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan diramalkan akan naik 10 kali lipat dalam transaksi *E-com* yaitu dari 3% menjadi 30%. Layanan belanja online Indonesia sekarang sudah mencapai 13 juta. Wright & Winn berpendapat bahwa kompleksitas *E-com* terletak pada alat atau media elektronik yang digunakan dan dalam praktek meliputi EDI, EFT, Telex, Fax, dan Internet. *E-com* tidak sesederhana yang diperkirakan, seperti hanya melalui internet. Salah satu definisi *Black's Law Dictionary*, yaitu bahwa *E-com* adalah:<sup>212</sup>

*"The practice of buying and selling goods and services through online consumer service on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a populer prefix for other terms associated with electronic transaction."*

Pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa *E-com* merupakan sarana pembelian dan penjualan barang dan jasa yang menggunakan sarana *online* melalui internet yang lebih populer dikenal sebagai *electronic transaction*, yaitu *"A transaction formed by electronic messages in which the messages of one or both parties will not be reviewed by an individual as an expected step in forming a contract."*<sup>213</sup>

Julian Ding<sup>214</sup> memberikan pengertian *E-com* dengan cukup lengkap sebagai berikut:

*"Electronic Commerce, or e-commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of 'rights'. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the Internet or the World Wide Web). The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements."*

<sup>212</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, St. Paul Minn: West Group, 1999:530.

<sup>213</sup>*Ibid.*

<sup>214</sup>Julian Ding, *E-commerce: Law and Practice*, Sweet and Maxwell Asia, Malaysia, 2000:67

dari pengertian yang diberikan Julian Ding tersebut, setidaknya terdapat 6 (enam) unsur dari suatu *E-com* yaitu

- (1). adanya transaksi dagang melalui kontrak;
- (2). kontrak dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik (termasuk media digital);
- (3). kehadiran para pihak tidak diperlukan secara phisik;
- (4). Medium kontrak menggunakan jaringan publik;
- (5). sistem jaringannya terbuka yaitu dengan media internet atau WWW atau media lainnya;
- (6). kontrak yang dilaksanakan tidak mengenal batas teritori negara dalam arti lepas dari yurisdiksi nasional atau *local/borderless*

Dengan adanya enam unsur yang biasanya ada dalam *E-com*, menunjukkan suatu persoalan hukum karena kontrak-kontrak yang dilakukan tidak mengenal batas teritori suatu negara dengan pergerakan yang cepat.

Apabila dibandingkan, antara Wright & Winn serta Julian Ding, pada dasarnya pengertian yang dibangun tentang *E-com* sama, hanya perbedaannya terletak pada media elektronik dan digital yang digunakan yaitu Wright & Winn berpendapat bahwa media yang digunakan meliputi Telex, Fax, EDI, EFT dan Internet sedang Julian Ding membatasi diri pada penggunaan media yang digunakan hanya dengan internet dan/atau WWW. Pendapat Julian Ding ini, menurut Elizabeth S. Perdue dikatakan sebagai *Online Contract*,<sup>215</sup> karena *Online contract is a contract created wholly or in part through communications over computer network. Thus, contract can be created by e-mail, through Web sites, via electronic data interchange, and other techniques.*<sup>216</sup>

Pengertian lain *E-com* yang menekankan dimensi teknologi dikemukakan oleh Jeffrey F. Report & Benard J. Jaworski yaitu “...as technology mediated exchange between parties (individuals or organizations) as well as the electronically based intra - or

---

<sup>215</sup>Elizabeth S. Perdue dalam Thomas J. Smedinghaff (Ed), **Online Law, The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet**, Reading, Massachusetts, Addison-Wesley Developers Press, 1999, p.79.

<sup>216</sup>*Ibid.*



*interorganizational activities that facilitate the exchanges.*"<sup>217</sup> Selanjutnya dikatakan oleh Jeffrey bahwa fokus dari *E-com* adalah *"...envolving away from simply technology-enabled to technology- mediated exchanges. Increasingly, transactions are managed or mediated largely by technology, and so is the relationship with the customer."*

Berbagai pendapat di atas merupakan wakil dari berbagai definisi yang diberikan oleh beberapa kalangan dengan penekanan yang berbeda baik dari perspektif proses bisnis, perspektif komunikasi, perspektif pelayanan, perspektif *online* yang pada dasarnya berbeda dari sisi media yang digunakan,<sup>218</sup> namun enam unsur yang secara yuridis menjadi kekhasan *E-com* biasanya selalu ada dalam berbagai pengertian *E-com* itu baik secara eksplisit maupun implisit dari setiap definisi. Berbagai pengertian tentang *E-com* terurai dalam pemaparan di bawah.

Menurut *Electronic Commerce Expert Group (ECEG)* seperti dikutip oleh Melissa De Zwart,<sup>219</sup> *E-com* adalah:

*"a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet, and telephone. For the purpose of this report the term is limited to those trade and commercial transactions involving computer to computer communications wether utilising an open or closed network."*

Pengertian yang dikutip oleh Melissa ini menunjukkan perbedaan dengan pengertian terdahulu khususnya media yang dipergunakan yaitu membatasi diri pada komunikasi komputer ke komputer baik menggunakan jaringan terbuka maupun tertutup sehingga apabila media yang dipergunakan adalah Telex, Fax, telekopi, telepon bukan merupakan *E-com*.

<sup>217</sup>Jeffrey F. Rayport & Bernard J. Jaworski, **Cases in E Commerce**, New York, McGraw Hill, 2002, p.1.

<sup>218</sup>Menurut Kalakota & Whinston, yang dikutip oleh Efraim Turban, et.al., **Electronic Commerce A Managerial Perspective**, New Jersey, Prentice Hall, 2000, p.4. *E-com* dilihat dari perspektif proses bisnis adalah aplikasi teknologi melalui transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja; perspektif komunikasi adalah penyerahan informasi produk/jasa, atau pembayaran melalui jaringan telepon, jaringan komputer, atau dengan maksud elektronik lainnya; Dari perspektif pelayanan adalah alat (a tool) yang mengalamatkan hasrat dari perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya pelayanan, memperbaiki kualitas barang dan mempercepat pelayanan; Dari perspektif online, yaitu menyediakan kemampuan pembelian dan penjualan produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.

<sup>219</sup><http://www.unsw.lawjournal.html> (Melissa De Zwart, "Electronic Commerce: Promises, Potential and Proposals,")

Pengertian lain tentang *E-com* dimaksudkan untuk menampung perkembangan hubungan perdagangan internasional, diberikan oleh UNCITRAL melalui *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*. Menurut *Model Law on Electronic Commerce*, *E-com* adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan *data messages*,<sup>220</sup> yaitu:

*"the term 'commercial' should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transactions for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road."*

Interpretasi UNCITRAL tersebut di atas cukup luas karena mencakup seluruh hubungan-hubungan sifat perdagangan baik yang bersifat kontraktual maupun tidak, dengan memberikan cakupan luas yaitu memerinci secara enumeratif sebagai cara untuk menampung perkembangan perdagangan dunia. Deskripsi tersebut di atas juga menggambarkan bahwa media yang dominan digunakan adalah elektronik (termasuk digital) dalam suatu jaringan baik tertutup maupun terbuka. Hal ini sangat berbeda dengan perdagangan konvensional yang *paper-based* dan keharusan kontak-kontak fisik para pihak diperlukan.

Berbagai definisi tentang *E-com* tersebut telah memberikan pemahaman adanya aksentuasi bahwa *E-com* tidak semata-mata perdagangan melalui internet tetapi cukup luas yaitu tidak hanya melakukan praktek penjualan dan pembelian saja tetapi juga pelayanan nasabah dan mengkolaborasi dengan partner bisnis dan melakukan transaksi elektronik (dan digital) ke dalam suatu organisasi atau individu. Dalam perkembangannya sekarang, *E-com* merupakan bagian dari *Electronic business (E-bis)* yang menjadi genusnya atau dengan kata lain *electronic commerce is a part of electronic business*. Hubungan antara *E-com* dan *E-bis*, ditegaskan oleh Lou Garstner IBM, CEO yaitu bahwa *E-business is all about time cycle, speed globalization, enhanced productivity*,

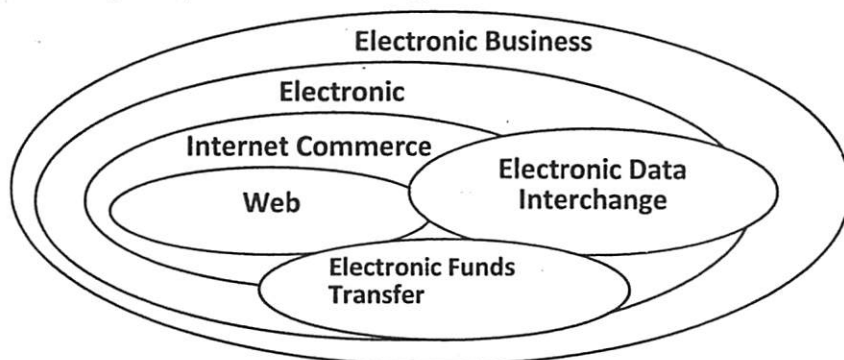
<sup>220</sup>Data messages adalah information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including; but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy.

reaching new customer and sharing knowledge across institutions for competitive advantage.<sup>221</sup>

Dekade pertengahan tahun 1990 terdapat dua pembidangan besar dalam hubungan bisnis *E-com* yaitu kontak antar bisnis (*business to business*) yang menggunakan sarana EDI (*Electronic Data Interchange*) untuk *E-com* dan pemakaian individu/perorangan yang menggunakan internet dan WWW. Pada Tahun 1995, internet mulai digunakan secara serius sebagai basis perdagangan dunia.<sup>222</sup> Keuntungan menggunakan EDI adalah:<sup>223</sup>

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <i>large volume of repetitive standard actions;</i>                       | A |
| 2. | <i>very tight operating margins;</i>                                      | V |
| 3. | <i>strong competition requiring significant productivity improvement;</i> | S |
| 4. | <i>operational time constraints;</i>                                      | O |
| 5. | <i>trading partners request for paperless exchange of documents."</i>     | T |

Sekarang, pertumbuhan *E-com* telah menunjukkan perkembangan yang mengagumkan, dan munculnya pembidangan yang jelas dengan terminologi-terminologi baru. Terminologi tersebut dimulai dengan *electronic business*, yang merupakan hubungan bisnis yang paling luas dan umum dan meliputi *E-com*, *internet commerce*, *Web Commerce*, EDI dan EFT. Penjelasan secara rinci tentang pembidangan tersebut dapat dijelaskan dalam **Figure 1** sbb:



<sup>221</sup>Efraim Turban, et.al., **Op.cit.**, p.4.

<sup>222</sup>Sidney L. Huff, et.al., **Op.cit.**, 1999, p.4.

<sup>223</sup>Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag, **Op.cit.**, p.15.



*"The largest oval is labeled "electronic business". Simply put, this includes everything having to do with the application of information and communication technologies (ICT) to the conduct of business between organizations or from company to consumer. Within the electronic business oval is smaller oval labeled 'electronic commerce'. This highlights the fact that there are numerous forms of business-related ICT – based interactions that can occur between businesses, or between a business and an end consumer, which do not directly concern buying and selling (i.e., 'commerce'). Only those forms of interaction having to do with commerce are included in the electronic commerce oval. This includes advertising of products or services, electronic shopping, and direct after sales support. It would not include such things as interorganizational collaboration, using ICT-based collaboration systems, for the development of a new product.*

*Within the electronic commerce oval is a smaller oval labeled 'Internet commerce.' This reflects the fact that electronic commerce need not be conducted only over the Internet. In fact a great deal of business-to-business electronic commerce is still today conducted over private networks, using primarily traditional EDI channels and value-added network (VAN) service providers. This is changing, as more and more companies adopt the Internet for some or all of their business-to business electronic commerce, but it will be many years before the Internet largely displace the VANs.*

*Within the Internet commerce domain lies an even smaller subset, termed "web commerce". This is the component of electronic commerce conducted strictly over the World Wide Web. The WWW is not the only way of using the Internet for commercial interactions. Electronic mail, for example, serves well for certain forms of electronic commerce. Software may be conveniently sold over the Internet using the file transfer protocol (FTP) for product distribution. Nevertheless, the Web is clearly the dominant medium for the large majority of Internet commerce today. Furthermore, since modern web browsers incorporate other Internet applications, including electronic mail and file transfer via FTP, all under one hood, users today have the perception that they are relying solely on the Web even as they send and receive e-mail, transfer files, and conduct other forms of Internet application that used to be conducted using separate application programs.*

*There are two other important domains represented in Figure 1. One is labeled "electronic data interchange." It is shown to lie fully within the electronic commerce realm, but it overlaps the other domains of web commerce, Internet commerce and electronic funds transfer. As discussed earlier, EDI precedes modern-day electronic commerce by almost two decades. It is clearly a type of electronic commerce, since EDI comprises standard formats for a variety of business commercial transactions such as orders, invoices, shipping documents, and the like. But EDI can be conducted either over private networks or over the*

*Internet. If conducted over the Internet, it may not make use of the WWW. Also, it may or may not involve aspects of electronic funds transfer.*

*Finally, the oval labeled 'electronic funds transfer,' or EFT, bears much the same relationship with the other domains as does EDI. It is an aspect of electronic commerce, hence is represented as falling fully within the electronic commerce oval. It can be conducted over the Internet or over private networks, and if over the Internet, it may or may not be conducted over the Web. Also, EFT may be executed using EDI standards or alternately may be done in non-EDI fashion ..."<sup>224</sup>*

Disamping tersebut di atas, *electronic business* juga termasuk di dalamnya: (1). *Electronic advertising*; (2). *Electronic buying and selling*; (3). *Electronic distribution*; (4). *Direct client interaction for marketing and customer service*; (5). *Groupware, e-mail, electronic collaboration*; (6). *Workflow, automated forma distribution*; (7). *Secure X.400 (e-mail) business transactions*.

Penjelasan yang terperinci tersebut di atas, sengaja dikutip untuk menunjukkan bahwa *E-com* mempunyai banyak aplikasi yaitu mulai dari belanja di mall dan toko yang melayani fasilitas *E-com*, *home banking*, *online-stock* pembelian barang dan jasa, *auction*, kolaborasi elektronik untuk proyek pembangunan serta penelitian yang membutuhkan dukungan informasi, sistem dan infrastruktur organisasi yang efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaan.

Pengertian-pengertian tentang *E-com* serta luas lingkupnya di atas, setidaknya memberikan pemahaman bahwa *E-com* adalah merupakan bagian dari *E-business* yang berdemensi luas. Pemahaman *E-com* sebagai perdagangan melalui internet adalah tidak tepat. *E-com* merupakan seluruh aktifitas bisnis yang dilakukan melalui media elektronik dan digital. Popularitas *E-com* sebagai perdagangan yang hanya menggunakan internet dan WWW karena *E-com* berkembang dengan pesat setelah menggunakan sarana internet dan WWW sehingga menjanjikan efisiensi dan efektivitas perdagangan. Sifat global, *borderless*, *paperless* dan disertai teknologi yang memungkinkan untuk itu, sangat menekan biaya-beaya (*low cost*) seperti misalnya: iklan, pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan segala informasi. Interaksi yang tidak mengenal waktu (24 jam) serta komunikasi dapat dilakukan bersama-sama oleh jutaan orang dari berbagai negara di dunia adalah keunggulan *E-*

<sup>224</sup>Sidney L. Huf, *Op.cit.*, p.4-6.

*com*. Disamping itu, *E-com* sangat efektif dan efisien untuk memperluas pasar yang tidak mengenal istilah nasional dan internasional karena sifat globalnya. Baku mutu produk dapat dijamin dengan baik karena individu-individu dan perusahaan-perusahaan dapat dengan cepat dan mudah untuk mendapatkan *supplier*, *customer*, *partner* yang dikehendaki sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan.

Terdapat empat perbedaan kategori dalam *E-com* yang diidentifikasi sebagai hubungan antar pebisnis (*business to business/B2B*), pebisnis dengan konsumen (*business to consumer/B2C*), konsumen dengan konsumen (*consumer to consumer/C2C*) dan konsumen dengan pebisnis (*consumer to business/C2B*).

#### **D. *Electronic Commerce* Menciptakan *Lex Informatica* sebagai Basis Transaksi MEA**

Berlakunya MEA pada tahun 2015 ini, Indonesia perlu dengan jeli menggunakan potensinya untuk menjadi *primus inter pares* diantara bangsa-bangsa di ASEAN. Melalui pola *primus inter pares* berarti Indonesia harusnya menjadi pemuka diantara bangsa-bangsa di ASEAN. Perdagangan untuk produk-produk barang dan jasa Indonesia perlu ditingkatkan kualitasnya, mendapatkan sertifikasi internasional yang sah, diproduksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga mudah bersaing. Perlu dikembangkan pemasaran produk-produk unggulan Indonesia dan diperkenalkan dengan maksimal. Salah satu iklan layanan yang efektif dan efisien adalah melalui *E-business* (dalam arti luas) atau *E-com*. Pemerintah sekarang yang berorientasi ke matra laut harus didukung melalui pembudidayaan dan pemasaran kekayaan laut secara maksimal karena sebenarnya Indonesia basisnya di matra laut. Semua itu bisa terjadi dengan akselerasi yang tinggi hanya melalui *E-Biss* atau *E-com*.

Ketika terjadi migrasi besar-besaran dalam transaksi perdagangan melalui *E-com* yang sangat signifikan, maka pada saat itu pula bertumbuh kebiasaan-kebiasaan dan kepatutan yang dihormati oleh para pihak sehingga menjadi hukum bagi para pihak itu. Transaksi-transaksi *online* melalui *E-com* di ASEAN mengalami perkembangan yang pesat. Prospek perkembangan *E-com* di Indonesia berkembang paling pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini yang diramalkan puncaknya pada tahun 2015 bersamaan dengan dimulainya ME-ASEAN. Investor asing cukup berperan untuk berkembangnya *E-com* di Indonesia, seperti telah melakukan pemasokan modal melalui investasi hampir diseluruh negara ASEAN oleh Rocket Internet yang berpusat

di Jerman untuk toko online. Sebagai contoh yaitu Officefab, Lasada FoodPanda dan Zalora. Commerce Net Indonesia telah mengembangkan setidaknya ada 8 situs perdagangan secara elektronik di Indonesia. Situs *E-com* yang mempunyai reputasi baik seperti gramedia.com, tokobagus.com, tokopedia.com, blibli.com, bhineka.com telah meningkatkan transaksi *E-com* di Indonesia. Total nilai pasar e-commerce Indonesia pertengahan tahun 2013-Januari 2014 diprediksi oleh Vela Asia dan Google mencapai USD 8 miliar dan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai angka USD 24 miliar. Visa memperkirakan *online shopping* di Indonesia tumbuh 40% tahun 2014 dan 53% tahun 2015, dari 23% tahun lalu. Mengingat pertumbuhan *E-com* yang pesat tersebut, aturan terkait *E-com* telah banyak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU No. 7 Tahun 2014 ini mirip dengan peraturan di berbagai Negara ASEAN (seperti: Singapura, Malaysia, Thailand, dll) tentang pengaturan hal yang sama sehingga berpotensi menjadi *Lex Informatica*. Pengaturan E-com itu memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara *E-com*, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam UU Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dan atau informasi *E-com* paling sedikit harus memuat identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan atau jasa, dan cara penyerahan barang.

Bila diperbandingkan dengan Singapura, negara yang mengalami revolusi teknologi informasi, hukum yang digunakan adalah konkordan dengan hukum Inggris yaitu AELA (*Application of English Law Act*). Sama seperti Indonesia, perkembangan *E-com* juga dimulai tahun 1996. Hingga Desember 1999, jumlah *website* yang terdaftar di



n kunci  
ectronic  
1 Pusat  
mputer  
dengan  
gadaan  
itu: (1).  
al; (2).  
s agar  
m oleh  
1 E-com  
melalui  
f untuk  
bahwa  
mimpin  
internet  
mbahas  
1 telah  
menjadi  
a sudah  
eberapa  
ronik.  
negara  
hukum  
lah itu,  
.. Model  
g umum  
kondisi

husus. Hal ini dapat diperbandingkan dengan CISG (*Contracts for the International Sale of Goods*). Dalam *Model Law E-com* UNCITRAL membatasi dirinya dengan memberikan pengakuan hukum terhadap penggunaan data messages serta media transaksi dalam suatu lingkungan komersial, sedangkan CISG bergerak lebih luas dengan menghubungkan signifikansi hukum pada transaksi-transaksi tersebut serta rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat di dalam kontrak.<sup>228</sup> *Model law* tidak memecahkan persoalan tentang kapan dan pada tingkatan apa pengiriman data yang ada akan menjadi sebuah penawaran atau penerimaan, pelanggaran atau penyelenggaraan.

Perkembangan *E-com* didorong oleh kemajuan lebih jauh di bidang teknologi informasi seperti perangkat genggam (*smartphone*), perangkat antarmuka berteknologi tinggi yang merekam karakteristik suara, telapak tangan, selaput bening dan DNA manusia, sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi data, *messages, records*, untuk keamanan transaksi. Oleh karena itu perkembangan TI yang standar tersebut akan mendorong standarisasi dan harmonisasi hukum karena dalam konteks siber, hukum berperan sebagai fasilitator bagi perhubungan hukum yang dilakukan dalam transaksi-transaksi yang terjadi.

Dijumpainya berbagai persamaan cirikhas dari berbagai negara di ASEAN dalam menyusun *E-com* dan berbagai peraturan di bidang TI, mendorong terjadinya harmonisasi hukum. Memang tidak dipungkiri bahwa telah terjadi perbedaan seperti dalam implementasi legislasi, status hukum transaksi elektronik, sistem pembuktian dan integritas komunikasi dalam transaksi antar negara, namun pada umumnya telah terjadi kesamaan prinsip untuk menuju harmonisasi.

Harmonisasi tersebut dimulai dari pengakuan universal terhadap persamaan fungsi yang ada dalam *Model Law* UNCITRAL tentang *E-com* serta *Electronic Signatures*. Kencenderungan umum adalah bahwa model law ini diikuti oleh negara-negara di dunia dan dimotori oleh AS dan negara-negara Eropa, seperti standarisasi tulisan, tanda tangan elektronik yang digunakan serta prosedur kontrak siber. Ciri-ciri harmonisasi tersebut juga dapat dilihat dari kontrak standar karena basisnya sama yaitu teknologi informasi yang memang standar untuk bisa berfungsinya sistem TI tersebut. Terdapat kecenderungan umum bahwa *model law E-com* dan *electronic*

*signatures* dapat diterima umum di ME-ASEAN, biarpun dengan modifikasi yang berbeda-beda namun prinsip-prinsip cenderung sama.

Berbagai keluhan ketidak beresan transaksi *E-com*, seperti hasil survey 12 organisasi konsumen dunia, yang diselenggarakan pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999, menunjukkan bahwa faktor negatif yang timbul dari bentuk perniagaan baru (*E-com*) antara lain: (1). Satu dari sepuluh jenis barang yang telah dipesan tidak pernah diterima pembeli; (2). Dua pembeli, masing-masing dari Inggris dan Hongkong, telah menunggu lebih dari 5 tahun untuk refund; (3). Hampir setengah (44%) produk yang telah dipesan ternyata diterima pembeli tanpa disertai dengan bukti pembayaran; hampir 73% pedagang gagal memenuhi kesepakatan kontrak (*crucial contract term*); lebih dari 25% penjual tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon, dan hampir 24% penjual tidak mencantumkan biaya yang jelas atas jenis barang yang telah dipesan<sup>229</sup>. Data lain menunjukkan bahwa dari hasil survey terhadap warga-warga yang berdomisili di Eropa mengatakan bahwa 25% dari warga Eropa tidak percaya untuk membeli di internet<sup>230</sup>. Namun dalam perkembangannya, *E-com* tetap mengalami perkembangan pesat dan berpotensi menyatukan sistem perdagangan dunia, terlebih di kawasan ASEAN dimana antar negara sangat berdekatan. Biarpun *E-com* baru 1% dari keseluruhan perdagangan konvensional, justru berpotensi untuk berkembang semakin baik dan pesat. Saat ini *E-com* telah menjamur ke berbagai belahan dunia, hal ini ditandai dengan munculnya *situs web E-com* yang terkenal seperti amazon, e-bay di Amerika dan Ali Baba.com di China, bahkan di negara kita ada Toko Bagus dan berniaga.com yang bahkan bisa membuat iklan di televisi. Indonesia adalah pangsa pasar *E-com* terbesar dunia. Indonesia juga penyumbang serangan internet terbesar dunia 38%, disusul Cina 33%, USA 6,9% Taiwan 2,5%, Turki 2,4% dan sisanya Negara lain. Indikator ini berpotensi pada perkembangan *E-com* di Indonesia sehingga layak kalau Indonesia menjadi motor *E-com* ASEAN. Semakin canggih, cepat dan sempurnanya TI yang mendukung *E-com*, maka hal ini parallel juga dengan perkembangan user untuk menggunakan transaksi melalui *E-com*. Standarisasi TI untuk memegang teguh '*five pillars of information assurance*' yaitu *confidentiality*,

<sup>229</sup> Purnomo, W.A., *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000:4

<sup>230</sup> Balboni, Paolo, *Trustmark in E-commerce the Value of Web Seals and the Liability of their Provider*, T-M-C Asser Press, The Hague and the Author, 2009:17.

*integrity, non repudiation, availability* dan *authenticity* menjadi jaminan bahwa *E-com* telah membentuk hukumnya sendiri karena sudah berkembang cukup lama.

Pengamanan *E-com*, AS dapat dijadikan contoh ASEAN, yaitu dengan didirikannya lembaga *Internet Fraud Council*, yang merupakan Dewan hasil dari kolaborasi anti kriminal online yang beranggotakan FBI, National White Collar Crime Center dan National Fraud Center. Tugas utama dewan ini adalah melacak, mengumpulkan data dan menghalangi kegiatan penipuan secara online. Keanggotaannya bersifat terbuka untuk perusahaan-perusahaan, institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah dan media yaitu dengan biaya tertentu, anggota bias mengakses dengan maksimal. 'Segel situs web' dari IFC terbaik bisa didapatkan anggota. Anggota bisa juga mengakses informasi hukum dan legislasi siber, mendapatkan fasilitas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang menunjang segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi siber.<sup>231</sup>

MEA seharusnya melihat potensi *E-com* ini untuk pengembangan transaksi perdagangannya. Oleh karena itu perlu diadakan proposal yang mengharmonisasikan dan memperbaiki secara komprehensif dari sisi teknologinya, kontraktualnya, yurisdiksi, penyelesaian sengketa, perpajakan, dll untuk mendukung *E-com*. Dan proposal ini ditingkatkan menjadi pokok bahasan perjanjian internasional khususnya MEA. Perjanjian internasional ini bisa mencontoh proses pembentukan UNIDROIT yang mengatur prinsip kontrak komersial internasional, CISG yang mengatur jual beli perdagangan internasional atau UCP yang mengatur tentang *Letter of Credit* sebagai buah-buah dari *lex mercatoria*. Regulasi yang dibuat dalam dunia siber hendaklah menyesuaikan karakter siber dan bersifat fasilitatif. Mengingat bahwa kegiatan dalam ruang lingkup *cyberspace* adalah kegiatan kehidupan yang dibangun sebagian besar oleh model kegiatan yang mediasinya berbasis pada teknologi informasi yang revolusioner, maka fungsi kehidupan diambil alih oleh kehidupan artifisial dengan ruangan yang maya. Oleh karena itu hukum sebagai *...a tool of social engineering...* tidak mungkin lagi dapat dipertahankan. Hal yang mungkin dilakukan adalah hukum perlu berperan sebagai mekanisme pengintegrasi (*law as integrative mechanism*) yang dapat mengakomodasikan berbagai dimensi kepentingan nasional dengan kepentingan

<sup>231</sup> Assafa Endeshaw, *Op.cit.*, 296.

internasional dan hukum perlu berperan sebagai fasilitator bagi perkembangan kegiatan berbasis pada teknologi informasi yang mengubah kebudayaan manusia.

### E. Simpulan

Perkembangan *E-com* untuk menyatukan dan memperlancar perdagangan dalam MEA adalah sangat signifikan karena *E-com* ke depan akan menjadi sarana yang paling efektif dan efisien untuk perdagangan. Dengan karakter yang *paperless* dan *borderless*, *E-com* akan meningkatkan kuantitas dan kualitas transaksi perdagangan. Penyatuan pasar ASEAN dan saling keterhubungan (*Interconnectedness*) antar masyarakat ASEAN membentuk *Lex informatica* sehingga terjadi harmonisasi hukum antar hukum-hukum yang berlaku di ASEAN.

Faktor-faktor pendukung *E-com*, hendaklah merupakan satu kesatuan terintegrasi yang berkarakter *cybernetic* sehingga semua aspek bisa dikerjakan, dimonitor dan dieksekusi secara transparan karena standarisasi TI berdasarkan pada '*five pillars of information assurance*' yaitu *confidentiality*, *integrity*, *non repudiation*, *availability* dan *authenticity* sehingga menjadi jaminan bahwa *E-com* telah membentuk hukumnya sendiri

Kelembagaan untuk pencegahan pelanggaran (*infringement*) di masing-masing negara ASEAN semacam IFC (*Internet Fraud Council*) di AS sangat diperlukan agar *E-com* dapat dijadikan sarana transaksi perdagangan yang aman, nyaman dan efisien di MEA.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Assafa Andeshaw, 2007, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- 'ASEAN Forum on Net Effects', *The Straits Times* (Singapura), 3 September 1996
- Garner, Bryan A. 1999, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, St. Paul Minn: West Group.
- Smedinghaff, Thomas J. (Ed), 1999, *Online Law, The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Reading, Massachusetts, Addison-Wesley Developers Press.



- Harvey, David., 2009, *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*, Yogyakarta, Resist Book.
- Jeffrey F. Rayport & Bernard J. Jaworski, 2002, *Cases in E Commerce*, New York, McGraw Hill.
- Johnson, David R. and David Post, 1996, "Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace", 481 *Stanford Law Review*.
- Julian Ding, 2000. *E-commerce: Law and Practice*, Sweet and Maxwell Asia, Malaysia
- Laura Jennings and Susan McCoy, *Cyberspace*, Lex Informatica, tanpa tahun, penerbit dan kota.
- Oatley, Thomas, 2004, *International Political Economy: Interest and Institutions in the Global Economy*, New York, Pearson Longman.
- Patrikios, Antonis "Resolution of Cross-border E-business Disputes by Arbitration Tribunals on the Basis of Transnational Substantive Rules of Law and E-business Usages: The Emergence of the Lex Informatica", April 2006, 21<sup>st</sup> BILETA Conference: Globalisation and Harmonisation in Technology Law, Malta.
- Purnomo, W.A., 2000, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Turban, Efraim et.al., 2000, *Electronic Commerce A Managerial Perspective*, New Jersey, Prentice Hall.
- <http://www.unsw/lawjournal.html>
- <http://sba.gov.sg/internet.html>